

TESIS

PENERAPAN PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI: STUDI IMPLEMENTASI KONSEP PEMULIHAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA SEBAGAI ALTERNATIF PEMIDANAAN DI INDONESIA

APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE PRINCIPLES IN THE HANDLING OF CORRUPTION CRIMES: A STUDY OF THE IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT OF STATE LOSS RECOVERY AS AN ALTERNATIVE TO CRIMINAL PUNISHMENT IN INDONESIA



Oleh:

ADHIWISATA TAPPANGAN

NIM. 2210622094

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
JAKARTA
2026**

TESIS

**PENERAPAN PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI: STUDI
IMPLEMENTASI KONSEP PEMULIHAN KERUGIAN
KEUANGAN NEGARA SEBAGAI ALTERNATIF
PEMIDANAAN DI INDONESIA**

***APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE PRINCIPLES IN
THE HANDLING OF CORRUPTION CRIMES: A STUDY OF
THE IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT OF STATE LOSS
RECOVERY AS AN ALTERNATIVE TO CRIMINAL
PUNISHMENT IN INDONESIA***



Oleh:

ADHIWISATA TAPPANGAN

NIM. 2210622094

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
JAKARTA
2026**

HALAMAN JUDUL

**PENERAPAN PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI: STUDI
IMPLEMENTASI KONSEP PEMULIHAN KERUGIAN
KEUANGAN NEGARA SEBAGAI ALTERNATIF
PEMIDANAAN DI INDONESIA**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Hukum Program Magister

**Disusun dan diajukan oleh:
ADHIWISATA TAPPANGAN
NIM. 2210622094**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
JAKARTA
2026**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENERAPAN PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI: STUDI IMPLEMENTASI KONSEP PEMULIHAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA SEBAGAI ALTERNATIF PEMIDANAAN DI INDONESIA

Disusun dan diajukan oleh:
ADHIWISATA TAPPANGAN
NIM. 2210622094

Disetujui untuk Tahap UJIAN TESIS
Pada Tanggal.....

Menyetujui:

Pembimbing 1



Dr. Supardi, S.H., M.H.
NIP. 197104281995031001

Pembimbing 2



Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M.
NIP. 198709222018031002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450
Telepon 021-7656971, Fax 021-7656904
Laman : hukum.upnvj.ac.id, e-mail: fh@upnvj.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

PENERAPAN PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI: STUDI IMPLEMENTASI
KONSEP PEMULIHAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA SEBAGAI
ALTERNATIF PEMIDANAAN DI INDONESIA

Disusun dan diajukan oleh:
ADHIWISATA TAPPANGAN
NIM. 2210622094

Telah diujikan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Pada Tanggal 10 Juli 2026
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat Kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing 1


Dr. Supardi, S.H., M.H.
NIP. 197104281995031001

Pembimbing 2


Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M.
NIP. 198709222018031002


Dekan Fakultas Hukum

Dr. Saefudin, S.H., LL.M.
NIP. 197006022021211004

Koordinator Program Studi
Magister Hukum


Dr. Muhammad Helmi Fahrozi, S.H.I., S.H.,
M.H.
NIP. 198910192025211048

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Adhiwisata Tappangan
NIM : 2210622094
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang Berjudul **“PENERAPAN PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI: STUDI IMPLEMENTASI KONSEP PEMULIHAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA SEBAGAI ALTERNATIF PEMIDANAAN DI INDONESIA”** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Jakarta, 15 Juni 2026

Yang Membuat Pernyataan,

A 10,000 Indonesian Rupiah banknote is shown, partially obscured by a large, stylized black signature. The banknote features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEPULUH RIBU RUPIAH' and '10000'.

Adhiwisata Tappangan
NIM. 2210622094

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adhiwisata Tappangan

NIM : 2210622094

Program Studi : Magister Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PENERAPAN PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI: STUDI IMPLEMENTASI KONSEP PEMULIHAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA SEBAGAI ALTERNATIF PEMIDANAAN DI INDONESIA”** beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 15 Juni 2026

Yang Membuat Pernyataan,



Adhiwisata Tappangan

NIM. 2210622094

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih karunia, penyertaan, dan berkat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya akhir ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Anter Venus, MA.Comm. selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta beserta para Wakil Rektor.
2. Bapak Dr. Suherman S.H., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta beserta para Wakil Dekan.
3. Bapak Dr. Muhammad Helmi Fahrozi, S.H.I., S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
4. Bapak Dr. Supardi, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, tambahan ilmu, serta masukan dan pengarahan dalam penulisan Tesis ini.
5. Bapak Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M. selaku Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan, juga tambahan referensi serta ilmunya
6. Istri tercinta, Liliany Paendong, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan moral, motivasi, pengertian, serta kesabaran yang luar biasa selama penulis menempuh pendidikan dan menyelesaikan penulisan tesis ini. Terima kasih atas segala pengorbanan, perhatian, dan semangat yang selalu diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini dengan baik.
7. Anak tercinta, Anzel Trikoyat Tappangan, yang menjadi sumber inspirasi, kebahagiaan, dan motivasi bagi penulis untuk terus berjuang dan memberikan

yang terbaik dalam menyelesaikan pendidikan Magister Hukum ini.

8. Mami Hetty Ngabalin, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, perhatian, serta dukungan kepada penulis selama menempuh pendidikan. Terima kasih atas kasih dan doa yang selalu menguatkan penulis hingga tesis ini dapat diselesaikan.
9. Papa Denny Paendong dan Mama Julia Kandowangko, atas doa, perhatian, dukungan, serta nasihat yang diberikan kepada penulis dan keluarga selama proses penyelesaian studi ini. Semoga segala kebaikan yang diberikan menjadi berkat yang berlimpah.
10. Joshua Rompas, yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan doa kepada penulis sehingga menjadi motivasi untuk terus menyelesaikan pendidikan Magister Hukum ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan yang penulis buat baik sengaja maupun tidak disengaja selama berkuliah di Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. maupun selama penulisan Tesis ini. Semoga Tuhan Yang Matta Esa mengampuni segala kesalahan dan menunjukkan jalan yang lurus dan benar kepada kita semua. Amin

Jakarta, 15 Juni 2026

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Adhiwisata Tappangan', with a long horizontal line extending to the right. There are some small letters 'P' and 'S' above the signature.

Adhiwisata Tappangan

ABSTRAK

PENERAPAN PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI: STUDI IMPLEMENTASI KONSEP PEMULIHAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA SEBAGAI ALTERNATIF PEMIDANAAN DI INDONESIA

Adhiwisata Tappangan (2210622094), Supardi, Beniharmoni Harefa

Tindak pidana korupsi merupakan *extraordinary crime* yang menimbulkan kerugian keuangan negara, menghambat pembangunan nasional, dan merugikan masyarakat. Namun, penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia masih didominasi pendekatan retributif yang berorientasi pada pidana penjara, sementara pemulihan kerugian negara belum optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis penanganan tindak pidana korupsi dan pemulihan kerugian negara di Indonesia saat ini serta mengkaji penerapan prinsip *restorative justice* sebagai alternatif pemidanaan di masa mendatang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh formulasi hukum yang sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme *asset recovery* dalam perkara korupsi belum berjalan optimal karena penegakan hukum masih berfokus pada pemidanaan pelaku. Penerapan prinsip *restorative justice* dapat menjadi alternatif dengan menempatkan pemulihan kerugian negara sebagai tujuan utama tanpa menghilangkan pertanggungjawaban pidana pelaku. Konsep yang ditawarkan adalah penggantian kerugian negara sebesar empat kali lipat dari nilai kerugian yang ditimbulkan guna meningkatkan efek jera dan efektivitas pemulihan keuangan negara. Disimpulkan bahwa reformulasi Pasal 4 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 diperlukan untuk memperkuat *asset recovery*. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang perlu mengatur mekanisme pemulihan kerugian negara yang lebih efektif melalui pendekatan *restorative justice*.

Kata Kunci: *Restorative Justice*; Tindak Pidana Korupsi; Pemulihan Kerugian Negara; *Asset Recovery*.

ABSTRACT

APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE PRINCIPLES IN THE HANDLING OF CORRUPTION CRIMES: A STUDY OF THE IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT OF STATE LOSS RECOVERY AS AN ALTERNATIVE TO CRIMINAL PUNISHMENT IN INDONESIA

Adhiwisata Tappangan (2210622094), Supardi, Beniharmoni Harefa

Corruption is an extraordinary crime that causes state financial losses, obstructs national development, and harms society. However, the handling of corruption cases in Indonesia remains dominated by a retributive approach that focuses on imprisonment, while the recovery of state losses has not been optimal. This study aims to analyze the current handling of corruption crimes and the recovery of state losses in Indonesia, as well as to examine the application of restorative justice principles as an alternative sentencing approach in the future. This study uses normative legal research with statutory, conceptual, and comparative approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials are analyzed qualitatively to formulate legal concepts that align with the objectives of the study. The findings show that the asset recovery mechanism in corruption cases has not worked optimally because law enforcement still focuses on punishing offenders. The application of restorative justice principles may serve as an alternative by placing the recovery of state losses as the main objective without eliminating the criminal liability of the offender. The concept proposed in this study is the repayment of state losses at four times the value of the losses caused, in order to strengthen deterrence and improve the effectiveness of state financial recovery. This study concludes that the reformulation of Article 4 of Law Number 31 of 1999 on the Eradication of Corruption Crimes, as amended by Law Number 20 of 2001, is necessary to strengthen asset recovery. Therefore, lawmakers need to regulate a more effective mechanism for recovering state losses through a restorative justice approach.

Keywords: *Restorative Justice; Corruption; State Loss Recovery; Asset Recovery.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL TESIS.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Orisinalitas Penelitian.....	11
BAB II	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Kajian Teoritis.....	13
1. Kajian Teori	13
2. Kajian Konseptual.....	17
B. Kerangka Pikir	20
C. Definisi Operasional.....	22
BAB III.....	24
METODE PENELITIAN	24
A. Jenis Penelitian	24
B. Pendekatan Penelitian	26
C. Tipe Penelitian.....	27

D. Sifat Penelitian.....	27
E. Metode Pengumpulan Data.....	28
F. Sumber Bahan Hukum.....	28
G. Teknik Analisis.....	29
BAB IV	30
HASIL DAN PEMBAHASAN	30
A. Analisis Penanganan Tindak Pidana Korupsi Dan Pemulihan Kerugian Negara di Indonesia Saat Ini	30
B. Analisis Penerapan Prinsip <i>Restorative Justice</i> Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Dan Implementasinya Dalam Konsep Pemulihan Kerugian Negara Sebagai Alternatif Pemidanaan di Indonesia Pada Mendatang.....	41
BAB V.....	54
PENUTUP.....	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA.....	56